

HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN STRICT LIABILITY DALAM SISTEM HUKUM COMMON LAW
(Studi Kasus *Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Countries Leather Plc*)

(Environmental Law and The Strict Liability Application In the Common Law System)

(The Case Study of Cambridge Water Co. Ltd V. Eastern Countries Leather Plc)

Oleh: **Mahfud***

ABSTRACT

The possibilities for pollution control still offered today Blackburn J.'s celebrated rule of strict liability, now almost 130 years old, has ensured its continuing popularity. There can be few tort lawyers, however, who have not increasingly wondered how much time should be devoted to a case which has received little judicial attention in recent years, and which was last subjected to detailed consideration by the House of Lords nearly 50 years ago, until, that is, the much-published decision of the House of Lords in Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Countries Leather Plc.

A. PENDAHULUAN

Perusahaan Cambridge Water Co (CWC) membeli tanah di Swaston Mill beserta dengan perairan dari sumur bor yang menyediakan sumber air bawah tanah bagi masyarakat. Pada tahun 1979, penelitian telah dilakukan terhadap perairan tersebut sebelum pembelian tanah dan standar yang digunakan pada penelitian tanah tersebut adalah sesuai dengan standar yang berlaku pada saat itu dimana kualitas air yang diteliti adalah cocok untuk dikonsumsi oleh publik. Pada tahun 1980, Dewan Uni Eropa mengadopsi suatu peraturan yang berhubungan dengan kualitas air yang cocok untuk dikonsumsi masyarakat. Peraturan Uni Eropa tersebut lebih ketat dalam hal pengawasan kualitas air minum yang mana peraturan ini mulai diterapkan

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

oleh Inggris sejak tahun 1985.¹ Perusahaan tersebut mengadakan tes kembali terhadap sumber air dalam hal menyesuaikan dengan aturan baru Uni Eropa tersebut dan pada tahun 1983 menemukan bahwa air dari Sawston Mill tersebut mengandung kadar perchloroethene (PCE) dalam jumlah yang tinggi yaitu cholrin yang digunakan untuk bahan industri yang tidak layak untuk diminum. Perusahaan Cambridge Water menutup sumber air tersebut dan berdasarkan investigasi yang panjang dan mendalam ditemukan bahwa sumber pencemaran tersebut berasal dari perusahaan Eastern Countries Leather Plc, 1.3 mil dari perusahaan Cambridge Water.

Perusahaan Eastern Countries Leather Plc (ECL) telah menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan yang mengeringkan kulit binatang dan membuatnya menjadi kulit sejak tahun 1879. Hakim pada pengadilan tingkat pertama, Ian Kennedy J., menyimpulkan bahwa perusahaan Eastern Countries Leather adalah perusahaan dengan reputasi yang baik, peduli terhadap masyarakat di sekitarnya dan perusahaan ECL ini telah mampu membuka lapangan kerja sekitar 100 orang pada perusahaan. Dalam beberapa tahun pada saat akhir industri pengeringan kulit hewan, ECL telah menggunakan organochlorines sebagai penghilang lemak dan minyak dan ini diterima bahwa perusahaan telah menggunakan PCE dalam jumlah yang bervariasi sampai dengan 100.000 liter per tahun mulai dari 1960-an sampai dengan 1991. Zat kimia sebagai pengurai ini dikirim dan disimpan di dalam drum di area perusahaan ECL, ketika diperlukan drum tersebut diangkut dengan menggunakan truk pengangkut dan dikosongkan dalam mesin pengurai. Selama proses pengangkutan tersebut terjadi kebocoran zat kimia PCE sampai

¹ Departement of Environmental Circular the United Kingdom 20/82.

dengan tahun 1976 dan tidak ada bukti sama sekali tentang kebocoran tersebut sampai pada tanggal hasil penelitian ditemukan. Kennedy J. menemukan bahwa meskipun PCE adalah zat kimia yang tidak stabil dan kemungkinan akan menguap saat disalurkan ke mesin pengurai, sangat sedikit ahli yang mengetahui mengenai daya tahan zat ini ketika bercampur dengan air bawah tanah sampai adanya penemuan di Sawston Mill tentang adanya zat ini. Ini membuktikan bahwa PCE telah mengendap dan mengalir melalui tanah ke sumber air dimana pada keadaan tertentu telah mencapai lapisan tanah yang tidak boleh dilalui yang kemudian secara perlahan larut dalam sumber air bawah tanah. Proses pengendapan antara pusat kontaminasi ke pusat sumber air bawah tanah di Sawton Mill diperkirakan sekitar sembilan bulan. Fakta juga terungkap bahwa bocoran PCE yang membuat genangan PCE berlanjut mengalir ke pusat sumber air bawah tanah.²

Setelah menutup sumber air bawah tanah yang tercemar oleh perusahaan CWC, perusahaan tersebut membuka sumur bor yang baru di Hinxtton Grange. Pembangunan sumur bor yang baru ini memerlukan dana sebesar £956,937. Jumlah dana untuk pembangunan sumur bor yang baru tersebut dimintakan ganti rugi oleh perusahaan CWC kepada perusahaan ECL karena kelalaian perusahaan ECL yang menyebabkan polusi di sumur bor pertama perusahaan CWC. Gugatan ganti rugi ini adalah berdasarkan precedence dalam kasus *Rylands vs. Fletcher*.

Sejumlah fakta dari rangkaian terjadinya pencemaran tersebut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus. Pertama, perusahaan ECL tidak dapat dikatakan kasus pencemaran yang berskala

² Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Counties Leather Plc, 1994 Volume 2 Appeal of Court, hlm. 264.

multi-nasional berdasarkan perusahaan privat; kedua, polusi yang ditimbulkan adalah terjadi di masa lampau bahwa kegiatan pencemaran tersebut baru dikatakan sebagai pencemaran ketika adanya peraturan yang lahir yang standar lingkungannya lebih tinggi; ketiga, peraturan yang diadopsi dari Uni Eropa telah meningkatnya permintaan agar anggota Uni Eropa patuh dengan regulasi yang lebih ketat; dan yang terakhir adalah bahwa tidak ada bukti jika PCE adalah membahayakan bagi kesehatan.³

Berikut pertimbangan yang dikemukakan oleh para hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung Inggris mengenai penyelesaian kasus pencemaran lingkungan tersebut

B. PEMBAHASAN

1. Pengadilan Tinggi (*High Court*)

Kennedy J. menolak gugatan yang diajukan oleh perusahaan CWC karena kelalaian dan gangguan pada air bawah tanah dengan alasan pencemaran di Swaston Mill akibat bocornya drum PCE di lahan perusahaan ECL adalah tidak dapat diprediksikan; perujukan terhadap kasus *Rylands vs. Fletcher* adalah tidak tepat dengan alasan penggunaan PCE oleh perusahaan pengeringan kulit tergugat adalah penggunaan alami dari tanah. Kedua dasar pertimbangan yang digunakan Kennedy J. adalah sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh House of Lords, Mahkamah Agung Inggris yang dapat kita lihat di bawah ini.

³ A Directive from Brussels, even Siller and Stupider than most, Weir, 1993, C.L.J. hlm. 17, in his *discussion of the Court of Appeal decision in Cambridge Water*.

2. Pengadilan Banding (*Court of Appeal*)

Perusahaan CWC tidak membanding penolakan hakim tersebut pada gugatannya mengenai kelalaian dan kerusakan yang diakibatkan oleh tergugat, tetapi mengajukan banding berdasarkan rujukan kepada kasus *Rylands vs. Fletcher*; meskipun demikian dalam keputusan yang banyak dikritik, Pengadilan Banding memutuskan bahwa berdasarkan prinsip *strict liability*, perusahaan ECL bertanggungjawab atas pencemaran dan harus mengganti rugi lebih dari £1 juta kepada perusahaan CWC. Pengadilan mendasarkan putusan ini kepada kasus *Ballard vs. Tomlinson*.⁴

Pengadilan Banding dalam pertimbangannya bahwa kasus pencemaran tersebut adalah sama dengan saluran *water closed* yang mengalir ke dalam sumur yang mencemari sumber air dalam hal ini sumber air perusahaan air minum CWC yang ada di sebelah lahan tergugat. Pengadilan Banding dalam putusannya bahwa tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh perusahaan CWC dengan alasan tergugat telah mencemari tanah penggugat melalui aliran bawah tanah. Putusan Pengadilan Banding terhadap kasus *Cambridge Water* ini adalah berdasarkan penerapan prinsip *strict liability*. Perusahaan ECL mengajukan kasasi ke House of Lords.⁵

3. House of Lords

Sebelum pembahasan mengenai kemungkinan pencemaran yang dapat diprediksikan oleh tergugat yang dipertimbangkan oleh House of Lords sebagai faktor penentu pertanggungjawaban *strict liability* dari tergugat, Lord

⁴ *Ibid*, hlm. 17

⁵ M. Mullender dan L. Dolding, *Environmental Law: notions of Strict Liability*, Journal of Business Law, volume 1995, hal. 95.

Goff yang memberikan putusan yang paling dominan yang disetujui oleh empat orang Lords lainnya menolak putusan dari Pengadilan Banding. Menurutnya, pada *Ballard v. Tomlisson* bahwa pemilik lahan memiliki hak untuk tanahnya dilindungi dari pencemaran yang berasal dari lahan milik orang lain sehingga pemilik harus dilindungi dari kelalaian pencemaran orang lain. Oleh karena itu, itu merupakan syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pelaku. Pada kasus *Ballard* sebenarnya tidak ditemukan cukup putusan yang dapat mendukung putusan pengadilan banding dalam hal *strict liability* dan meskipun ini sulit untuk dimengerti apa yang menjadi pertimbangan penting terhadap kelalaian dan kemampuan melihat apa yang terjadi, ini terlihat jelas bahwa pengadilan berpendapat ini sesuai dengan *strict liability*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, satu pertanyaan terhadap House of Lords adalah pertanggungjawaban berdasarkan *precedent* dari kasus *Rylands vs. Fletcher*, dan pada pendapat yang dikemukakan oleh Lord Goff, hal pertama adalah bukan masalah bukan penggunaan alami yang telah dilihat secara sangat penting pada Pengadilan Tinggi tetapi apa yang dinyatakan perusahaan ECL adalah perkiraan kemungkinan apa yang dapat terjadi secara beralasan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan adalah persyaratan pada pertanggungjawaban berdasarkan hukum; lebih jauhnya pada pertimbangan hubungan yang kuat antara kerusakan dan aturan, pemeriksaan dari perkiraan akan terjadinya pencemaran tersebut adalah sesuai dengan prinsip *strict liability*.

4. Kelalaian, Kerugian dan *Rylands v. Fletcher*

Meskipun hubungan antara kelalaian dan ganti rugi dari pencemaran telah mengakibatkan perdebatan hukum dan akademik yang serius. Ini telah

diterima secara luas bahwa sejauh pertanyaan yang jauh dari kerugian yang dibicarakan, putusan dari Privy Council pada kasus *Wagon Mound no. 1*.⁶ *Wagon Mound no. 2* juga menerapkan hukum akibat dari sesuatu kerugian yang dapat diprediksikan terjadi secara rasional yang relevan dengan jenis kerugian adalah syarat untuk adanya suatu pertanggungjawaban.⁷ Adanya kesepakatan akan tanggungjawab si pelaku, Lord Goff kemudian mempertimbangkan hal yang kurang pasti dari keadaan kemampuan untuk melihat terjadinya kerugian yang akan timbul berdasarkan kasus *Rylands vs. Fletcher*, menghasilkan kesimpulan yang lebih diperdebatkan bahwa di sini terdapat tanggungjawab adalah tergantung kepada kemampuan untuk melihat kerugian yang relevan yang akan timbul di kemudian hari.⁸

Dalam memberikan putusan ini, House of Lords menggambarkan faktor *preceden* yang begitu luas, pendapat para akademisi, perkembangan peraturan dengan memilih peraturan yang mampu mengkaitkan dengan putusan House of Lords pada kasus *Murphy v. Brentwood District Council*. Sebagai contoh, menyangkut pertanyaan yang sulit dijawab tentang hubungan antara kesalahan dan *Rylands v. Fletcher*, House of Lords menerima pendapat Professor Newark bahwa hakim Blackburn J yakin dia tidak melakukan hal yang berlebihan daripada menyatakan hukum yang berlaku tentang kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban meskipun referensinya harus diambil dari kasus yang tidak berhubungan langsung.⁹ Pendapat yang serupa selanjutnya dalam penerapan *Rylands v. Fletcher* sebagai aspek dalam memintakan pertanggungjawaban adalah dapat digambarkan dari kesamaan

⁶ *Overseas Tankship (U.K.) Ltd v. Morts Dock and Engineering Co. Ltd*, 1961, Appeal Court, hlm. 388.

⁷ *Overseas Tankship (U.K.) Ltd v. Miller Steamship Co. Pty.*, 1967, Appeal Court, hlm. 617.

⁸ Winfield dan Jolowicz, *On Tort*, 1993, Cotton Law Journal, volume 13, hlm. 380

⁹ Newark, *The Boundaries of Nuisance*, 1949, Volume. 65 L.Q.R. hlm. 480.

fungsi antara prinsip pelaku yang sadar akan dapat dimintakan tanggungjawabnya dan konsep dari keadaan alami berdasarkan hukum. Dalam hal ini Lord Goff berpendapat bahwa ini adalah langkah yang logis untuk memperluas konsep hukum pada kasus Wagon Mound dari ketidakmungkinan untuk dimintapertanggungjawaban berdasarkan kasus *Rylands vs. Fletcher*.

Berdasarkan pendapat Blackburn J., tidak ada seorangpun yang menyangkal bahwa kemampuan untuk memperkirakan resiko adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan tetapi House of Lords telah mengakui bahwa pendapat para akademisi dibagi dua pertanyaan, digantungkan pada pendapat Blackburn J. diatas pada putusannya dimana ia mengacu kepada "akibat alami dan yang perlu diantisipasi" untuk mendukung putusan ini bahwa arti dari pengetahuan dari jenis kerugian yang relevan adalah diinginkan, mengabaikan penerapan aturan hukum yang sebelumnya karena gagal menyebutkan tanda yang kuat untuk melawan konsep ini. Putusan pada kasus *Read vs. Lyons* dimana House of Lords menguatkan persyaratan adanya limbah yang mengalir di luar kontrol si tergugat sehingga menolak untuk mengembangkan aturan ke dalam teori umum *strict liability* terhadap kegiatan yang sangat berbahaya adalah juga disebut dalam rangka untuk membantu pencegahan pendekatan yang dipaki pada kasus Cambridge Water tetapi ini diajukan sebagai alasan bahwa House of Lords untuk menggambarkan salah satu putusannya yang diambil lebih dari 50 tahun yang lalu sebagai pengecualian yang efektif dalam perkembangannya adalah sama sekali bukan masalah.

Sama halnya, keraguann dari Komisi Hukum, dinyatakan lebih dari 20 tahun yang lalu mengenai kebijakan melakukan tes *strict liability* dengan referensi kepeda konsep umum dari kegiatan yang sangat berbahaya

digunakan untuk membenarkan usulan bahwa hari ini ”hakim bahkan lebih ragu untuk menggunakan konsep tersebut”. Dengan demikian, kegiatan perancangan peraturan akan berskala pada nasional atau internasional untuk mempromosikan perlindungan lingkungan tidak menarik perhatian dan pendapat premature menentukan bahwa terlalu banyak yang peraturan yang sudah dipublikasikan dan dirancang dengan baik akan tetapi sedikit peraturan dalam sistem hukum *common law* dengan prinsip pelaku harus membayar dan ini sedikit yang menarik pengadilan untuk memperkenalkan prinsip ini.

Akibat praktis putusan pada kasus *Cambridge Water*, jika kemampuan untuk memprediksikan kerugian yang relevan untuk timbul adalah dengan menerapkan tes pertanggungjawaban berdasarkan kasus *Rylands vs. Fletcher*, pertanyaan kepada perusahaan dan penasihat perusahaan adalah kerugian yang dapat diprediksi tersebut dapat dilihat oleh siapa? Sejauh fakta dari kasus yang sedang dibahas, jawaban yang diberikan oleh House of Lords adalah tidak ada seorangpun yang dapat disalahkan pada perusahaan ECL sehingga melepaskan si tergugat dari tanggungjawab tetapi tanpa menjelaskan petunjuk yang lebih jauh pada kasus ini. Untuk hal ini harus dilihat pada pertimbangan putusan yang diberikan oleh Kennedy J., ketika memeriksa klaim penggugat mengenai kelalaian dan kesalahan dimana pendekatan yang digunakannya dalam hal ini kelihatannya telah dapat diterima oleh Lord Goff bahwa tes oleh pengawas yang beralasan yang mengontrol jalannya mesin.¹⁰

Catatan penting yang lebih jauh dari gugatan yang diajukan oleh perusahaan CWC bahwa perusahaan ECL seharusnya disalahkan baik dalam hal kerugian atau berdasarkan *precedence* yang ada dalam kasus *Rylands v.*

¹⁰ *Rylands v. Fletcher*, 1866, Law Review Journal Volume 1 hlm. 330.

Fletcher, untuk pencemaran yang terjadi akibat aktivitas perusahaan yang ada pada masa lalu di sumber pengeboran air Swaston Mill yang sebagaimana dicatat oleh hakim adalah akan berlanjut tanpa ada akhirnya, berdasarkan hasil penelitian ilmiah bahwa pencemaran tersebut adalah beralasan dapat diperkirakan terjadi oleh tergugat. Menolak alasan ini karena zat kimia PCE telah melewati batas kemampuan mengontrol dari perusahaan ECL, House of Lords menyatakan bahwa ini bagaimanapun sulit untuk dimengerti, bahwa kesalahan untuk melanjutkan keluar dari situasi ini harus diputuskan dengan referensi misalnya kepada kasus longsor tanah *Leakey vs. National Trust*.¹¹ Pada kasus ini Pengadilan Banding menerapkan prinsip yang dibangun dalam kasus *Sedleigh-Denfield vs. O'Callaghan* dan *Goldman vs. Hargrave* untuk memeriksa kesalahan dari penghuni tanah yang sudah terkandung kerugian di dalamnya baik yang diakibatkan secara alami maupun kegiatan yang diakibatkan oleh orang lain adalah bukan kesalahan orang yang menempati tanah tersebut. Pada keadaan ini, kewajiban penghuni tanah untuk mengurangi pencemaran diputuskan dengan referensi standar menengah yang terlihat untuk diperhatikan adanya tanggung jawab individual baik oleh si penetap di atas tanah tersebut maupun si penggugat.

Harus diingat bahwa pada pertimbangannya yang awal, Lord Goff menyatakan bahwa area hukum yang diatur oleh dua kasus tidak dipengaruhi oleh kasus *Cambridge Water*, kasus yang ini memfokuskan pada kesalahan dari si pelaku pencemaran, ini dapat diasumsikan terhadap fakta tertentu, House of Lords berpendapat bahwa standar khusus harus juga diterapkan kepada si pelaku dan zat kimia PCE telah mengalir melalui tanah diluar batas

¹¹ Ibid, hal. 337.

kendali atau pengawasan perusahaan ECL. Pemilik dan penetap selanjutnya harus mengingat, bagaimanapun, kegagalan pengawasan secara fisik terhadap polutan tak perlu membebaskan tergugat dari kesalahan setiap kasus di atas.

Setelah putusan yang memberikan kepuasan bagi House of Lords bahwa kemampuan untuk memprediksikan sesuatu polusi yang terjadi di masa yang akan datang secara beralasan adalah kunci untuk adanya kesalahan berdasarkan referensi pada kasus *Rylands v. Fletcher*, House of Lords dihadapkan pada konsep penggunaan non-natural, persyaratan yang diperkenalkan terhadap peraturan oleh Lord Cairns ketika kasus diperiksa oleh House of Lords. Apakah Lord Cairns ingin tau tidak pernyataannya menjadi lebih dari mengulang pendapat Blackburn J. untuk menyebutkan bahwa pencemaran tersebut bukanlah natural. Ini jelas bahwa penggunaan secara natural telah diperluas untuk merangkul penggunaan secara biasa dari tanah tersebut adalah tepat untuk keuntungan masyarakat sekitar dan telah menjadi faktor penentu utama dalam peeraan aturan hukum.¹²

Hal ini apa sesuai dengan konsep yang hakim Kennedy J., terapkan bahwa penggunaan lahan untuk industri pada umumnya yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal adalah dianggap penggunaan tanah secara natural. Akan tetapi, menurut Lord Goff interpretasi yang terlalu *fleksible* ini dapat membawa ketidakpastian hukum yang tidak dapat diterima dan meskipun menolak untuk mendefinisikan kembali konsep, ia menyatakan bahwa penggunaan PCE oleh perusahaan ECL dan penyimpanan sejumlah zat kimia pada area industrinya harus dipahami sebagai kasus klasik penggunaan non natural lahan tanah. Ini akan salah, akan tetapi terhadap aspek putusan ini

¹² *Ibid*, hlm. 339.

yang memperluas berlakunya suatu aturan hukum lebih terlihat bahwa House Of Lords mudah mengenali bahwa pada bentuk konsep ini adalah tidak cukup untuk berhadapan dengan kesulitan pengendalian polusi pada zaman moderen sekarang yang berkeinginan bahwa ini seharusnya kering pada tanaman yang terkena zat kimia digantikan dengan persyaratan perkiraan resiko rasional.

Aspek lainnya yang juga diperdebatkan dalam preceden dari kasus *Rylands v. Fletcher* yang tidak pernah diungkapkan dalam banding tidak dipertimbangkan oleh House of Lords mengingat sulitnya hal ini sehingga pertanyaan tersebut sebagai status dari penggugat dan ketersediaan dari perlawanan kegiatan yang bersifat alami atau kegiatan dari pihak ketiga. Penerapan ini secara umum dipertimbangkan untuk memperkenalkan konsep kelalaian ke dalam aturan hukum, walau tidak jelas, tetapi dalam penerapan yang diadopsi House of Lords adalah sepertinya masa mendatang pengadilan akan berpendapat secara *ekstensive* terhadap konsep *strict liability*.¹³

Hal lainnya yang tidak dibahas dalam kasus Cambridge Water adalah penyebab yaitu hal yang sering dilupakan dalam perdebatan di bidang pertanggungjawaban yang *strict* (tanpa kesalahan) versus pertanggungjawaban dengan kesalahan dan ini sepertinya akan tetap menjadi faktor penentu dalam banyak kasus polusi meskipun investigasi yang komplit dalam Cambridge Water adalah pada akhirnya mampu untuk melihat sumber pencemaran perusahaan ECL. Bukti dari para ahli gagal untuk memuaskan hakim di persidangan bahwa adanya kegiatan perusahaan lokal yang lainnya yang juga dipakai oleh penggugat telah mengakibatkan menjadi akibat penentu pada sumur bor di Swaston Mill.

¹³ Newark, *Op.cit*, hlm. 489.

5. Kasus Burnie Port Authority v. General Jones Pty. Ltd

Semua apa yang dibahas sebelumnya meninggalkan pertanyaan, apakah yang secara praktis disebut dengan *strict liability* pada kasus *Rylands v. Fletcher* setelah *Cambridge Water*? Ini jelas House of Lords terlihat tetap tidak terpengaruhi dengan prinsip bahwa kelalaian tidak diperlukan dari pencemaran yang terjadi diluar kontrol pelaku tetapi realita yang penting dari hal ini diperdebatkan dalam hal ketidakpastian seputar pembelaan yang tersedia dan keraguan dari House of Lords untuk menerapkan prinsip *strict liability* pada kasus *CWC vs ECL* tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan ini, salah satu putusan terbaru dan penting dari Pengadilan Tinggi Australia pada kasus *Burnie Port Authority v. General Jones Pty. Ltd*, dengan ilustrasi bahwa konflik peradilan dan ketidakpastian seputar aturan yang diterapkan pada kasus *Rylands vs. Fletcher* khususnya dan penerapan aturan *common law* secara umum tidak dibatasi oleh Pengadilan Inggris.¹⁴

Pada kasus *Burnie* yang berkaitan dengan *strict liability* karena kerusakan kebakaran yang disebabkan oleh kontraktor yang bekerja dengan zat kimia di area milik pemerintah, pengadilan memutuskan bahwa untuk tujuan sistem *common law* Australia telah mengadopsi aturan *Rylands vs. Fletcher* dalam hal penentuan kelalaian yang biasa. Dasar dari putusan ini terlihat mudah dari fakta kesamaan yang telah membangun antara *precedence* dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan, putusan ini berbeda dengan apa yang diputuskan pada kasus *Cambridge Water*. Putusan apa yang diputuskan House of Lords ini menjadi kontroversial tetapi berdasarkan putusan dari

¹⁴ *Burnie Port Authority v. General Jones Pty. Ltd*, 1994, Australian Law Journal, hlm. 331.

Pengadilan Australia ini bagaimana penerapan *strict liability* adalah jelas. Oleh karena itu, ini terlihat bahwa House of Lords telah mempercepat penghapusan *precedence* yang diambil dari kasus *Rylands vs. Fletcher* pada yurisdiksi yang dimilikinya sebagai pengadilan tertinggi di Inggris.

Pada kasus *Burnie*, hakim Brennan J. yang mengingatkan mengenai perlunya untuk memeriksa kasus secara hati-hati ketika memperluas penerapan *common law* telah diberikan perhatian oleh pengadilan Inggris dalam sepuluh tahun terakhir ini. Ketika mengakui kesulitan dan persamaan yang telah dibangun antara pertimbangan pada kasus *Rylands vs. Fletcher* dan kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian, Brennan J., berpendapat bahwa ini saja tidak cukup alasan untuk menghalangi hak individual yang layak diberikan berdasarkan sistem *common law*. Pendapat ini diambil dari hakim McHugh J., dari kritikan yang keras dari sebagian besar hakim lainnya pada putusan dari kasus *Burnie Port Authority* dan House of Lords pada kasus *Cambridge Water*.¹⁵ Brennan J. terlihat setuju dengan penerapan *strict liability* pada kasus kebocoran perusahaan ECL tersebut. Sedangkan McHugh berpendapat lebih *realistic* bahwa tidak diterapkan konsep *strict liability* yang ada pada kasus *Rylands vs. Fletcher* dengan perkiraan resiko yang rasional akan menyebabkan si tergugat bebas dari tanggung jawab. Menurutnya dalam hal terjadinya kebocoran zat kimia yang berbahaya maka ini akan menyebabkan ketidakpastian pertanggungjawaban. McHugh mengemukakan dua hal, pertama; hal yang sangat penting yaitu apa yang dapat diperankan oleh kemampuan memprediksikan kerugian di masa akan datang ketika penelitian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 338.

ilmiah dilaksanakan sebelum perusahaan dijalankan, dan kedua; perlunya kehati-hatian ketika memperluas *common law*.¹⁶

Penerapan prinsip *strict liability* yang dapat dilihat dengan jelas seperti kasus yang tersebut di atas tidak ada yang diadopsi oleh House of Lords pada saat memutuskan kasus *Cambridge Water* dimana pencemaran ini berasal dari pencemaran dimasa lampau yang akibatnya dirasakan di masa yang akan datang. Dari putusan tersebut terlihat bahwa perindustrian atau pabrik menolak penerapan *strict liability* yang bersifat *retroactive* yang mengakibatkan lahirnya ketakutan adanya “*superfund*” dan Lord Goff jelas dipengaruhi oleh *preceden* terbaru yang tidak memandang adanya kesalahan pada pencemaran yang penyebabnya mulai terjadi di masa lampau dan baru diketahui di kemudian hari. Akan tetapi, solusi yang ditempuh oleh House of Lords tidak membedakan antara pencemaran yang diakibatkan pada masa lampau atau lainnya dan meskipun demikian House of Lords tidak menerapkan pendekatan yang digunakan oleh common law pada umumnya untuk penyelesaian kasus terkait *historic pollution* ini. Pendekatan yang digunakan House of Lords pada kasus ini telah membingungkan penyelesaian kasus *strict liability* pencemaran lingkungan.

C. KESIMPULAN

Ini akan menjadi hal yang tidak lazim untuk mengatakan bahwa sistem *common law* telah memainkan atau akan memainkan peran utama dalam pengaturan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, pendekatan yang diambil oleh House of Lords dalam putusan kasus *Cambridge Water* menimbulkan

¹⁶ Shutherland Shire Council v. Heyman, 1985, Volume 60. Australia Law Journal, hal. 43.

pertanyaan bahkan pengurangan aturan penentuan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang sudah menjadi tradisi dalam *system common law*. Penerapan hukum yang tepat seharusnya sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh hakim McHugh J., sebelum House of Lords mengacu kepada kasus *Rylands vs. Fletcher*.

DAFTAR PUSTAKA

M. Mullender dan L. Dolding, *Environmental Law: notions of Strict Liability*, Journal of Business Law, volume 1995.
Newark, *The Boundaries of Nuisance*, 1949, Volume. 65 L.Q.R.
Winfield dan Jolowicz, *On Tort*, 1993, Cotton Law Journal, volume 13.

Peraturan Perundang-undangan

A Directive from Brussels, even Siller and Stupider than most, Weir, 1993, C.L.J.
Departement of Environmental Circular the United Kingdom 20/82

Kasus

Burnie Port Authority v. General Jones Pty. Ltd, 1994, Australian Law Journal.
Cambridge Water Co. Ltd v. Eastern Counties Leather Plc, 1994, Volume 2 Appeal of Court.
Overseas Tankship (U.K.) Ltd v. Morts Dock and Engineering Co. Ltd, 1961, Appeal Court.
Overseas Tankship (U.K.) Ltd v. Miller Steamship Co. Pty., 1967, Appeal Court.
Rylands v. Fletcher, 1866, Law Review Journal Volume 1.
Shutherland Shire Council v. Heyman, 1985, Volume 60. Australia Law Journal.